

BAB VI

PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab V, dapat disimpulkan mengenai akuntabilitas pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa (studi kasus pada empat desa di Kecamatan Maluk dan Kecamatan Sekongkang sebagai berikut:

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada empat desa di Kecamatan Maluk dan Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat, dapat diambil beberapa simpulan yaitu perencanaan pengelolaan keuangan desa telah melaksanakan konsep akuntabilitas yang cukup baik yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif dan responsif. Pelaksanaan program pada desa juga sudah menerapkan akuntabilitas, partisipatif dan transparan. Pelaporan keuangan desa sudah dibuktikan dengan pertanggungjawaban yang cukup baik pada Bupati, DPRD atau pada masyarakat desa.

Disini perangkat desa sudah dapat melaporkan anggaran yang digunakan secara cukup baik, karena dari laporan keuangan tersebut semuanya telah sesuai dengan peraturan yang dibuat, pertanggungjawaban keuangan baik secara teknis maupun administrasi sudah baik.

Keuangan desa seharusnya diperkuat karena untuk menguatkan pilar-pilar akuntabilitas di desa, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, keuangan desa merupakan sumber utama pembangunan desa. Kedudukan masyarakat menjadi sumber kegiatan pembangunan yang sangat penting untuk kebutuhan hidup masyarakat desa, memperbesar dan memperkuat peran dari pemerintah desa, masyarakat desa dan swasta di desa menjadi langkah mendasar dan mutlak dalam proses pengelolaan keuangan desa.

Untuk penilaian responden pada variabel perencanaan di empat desa yaitu yang *pertama* Desa Benete masuk dalam kategori kurang dengan indeks 2.52, *kedua* Desa Maluk masuk dalam kategori cukup dengan

nilai indeks 2.93, *ketiga* Desa Sekongkang Bawah masuk dalam kategori cukup dengan indeks 2.92, *keempat* Desa Sekongkang Atas masuk dalam kategori kurang dengan nilai indeks 2.28.

Selanjutnya penilaian responden pada variabel pelaksanaan di empat desa yaitu yang *pertama* Desa Benete masuk dalam kategori kurang dengan indeks 2.19, *kedua* Desa Maluk masuk dalam kategori kurang dengan nilai indeks 2.31, *ketiga* Desa Sekongkang Bawah masuk dalam kategori kurang dengan indeks 2.45, *keempat* Desa Sekongkang Atas masuk dalam kategori kurang dengan nilai indeks 2.24.

Seterusnya penilaian responden pada variabel pertanggungjawaban atau evaluasi di empat desa yaitu yang *pertama* Desa Benete masuk dalam kategori kurang dengan indeks 2.60, *kedua* Desa Maluk masuk dalam kategori cukup dengan nilai indeks 2.69, *ketiga* Desa Sekongkang Bawah masuk dalam kategori cukup dengan

nilai indeks 2.72, *keempat* Desa Sekongkang Atas masuk dalam kategori cukup dengan nilai indeks 3.05.

VI.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab V, maka saran-saran yang dapat diberikan mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

1. Bagi Pemerintahan Desa

- a) Untuk terwujudnya pembangunan di desa, maka pemerintah desa harusnya membuat perencanaan yang baik dalam proses penyusunan APBDes. Selanjutnya kepala desa membuat keputusan desa untuk mengatur pelaksanaan program yang dibutuhkan masyarakat desa.
- b) Untuk memaksimalkan pemanfaatan dari potensi keuangan desa, misalnya pendapatan desa dari dana desa, alokasi dana desa ataupun dari pajak bagi hasil,

dari sumber pendapatan yang banyak tersebut pemerintah desa seharusnya berkerja lebih baik untuk meningkatkan program-program yang didanai oleh keuangan desa.

- c) Tetap mempertahankan prinsip akuntabilitas, partisipatif dan transparan dalam pengelolaan keuangan desa yang sudah cukup baik dilakukan selama ini. Perbaikan secara terus menerus merupakan fokus dari sebuah program yang tidak lepas dari peraturan perundang-undangan yang ada. Agar pemerintah desa dapat mengelola keuangan dengan baik.

2. Bagi Masyarakat Desa

- a) Masyarakat sebagai subjek penggunaan keuangan desa seharusnya bisa ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan,

pelaksanaan ataupun pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa.

- b)** Seharusnya masyarakat desa bersemangat untuk memberikan sumbangan pendapat dalam proses pengelolaan keuangan desa yang semua itu untuk pembangunan desa.
- c)** Masyarakat juga seharusnya selalu mengawasi pemerintah desa, misalkan saja masyarakat selalu ikut hadir dalam rapat Musrenbangdes yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, dari sinilah masyarakat bisa memberikan masukan dan pendapatnya terkait pembangunan di desa.